

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Secara yuridis, berdasarkan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2017, LPD diklasifikasikan sebagai Entitas finansial berbasis komunal yang berada di bawah kepemilikan desa adat di Bali. Regulasi tersebut membatasi ruang lingkup manajerial dan distribusi layanannya secara eksklusif bagi masyarakat adat setempat dalam yuridiksi wilayah terkait. Sebagai Entitas yang dikuasai secara kolektif oleh komunitas adat, LPD memiliki keterikatan inheren terhadap nilai-nilai kultural setempat serta berfungsi sebagai katalisator dalam mendistribusikan nilai tambah pada aspek sosiokultural dan kesejahteraan ekonomi anggotanya.

LPD bertujuan untuk memperkuat kemandirian dari perekonomian desa dengan melakukan pemberian kredit, mengelola tabungan, dan pelayanan keuangan lainnya. Merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002, eksistensi LPD di Provinsi Bali diproyeksikan sebagai instrument penguatan ekonomi rural melalui stimulasi budaya menabung serta penyediaan akses permodalan bagi usaha mikro, kebijakan ini bertujuan strategis untuk mengeliminasi praktik kredit eksploitasi sekaligus mengakselerasi eskalasi kesejahteraan dalam lingkup komunitas pedesaan (denpasarkota.go.id, 2020). Proliferasi institusi finansial non-perbankan di wilayah rural berperan krusial dalam mengakselerasi eskalasi kesejahteraan serta standar purata kehidupan komunitas lokal. Sebagai Entitas intermediasi yang berbasis pada kredibilitas dan pelayanan, LPD memprioritaskan ekspansi pangsa pasar melalui akuisisi debitur baru serta intensifikasi penyaluran pembiayaan maupun diversifikasi jasa keuangan. kontinuitas eksistensi LPD secara fundamental

bertumpu pada sinergi antara efisiensi manajerial operasional dan legitimasi social di dalam ekosistem komunitas adat. Sustainability lembaga tersebut dapat direalisasikan melalui harmonisasi antara kredibilitas publik, stabilitas fiskal serta kapabilitas adaptif dalam merespons fluktuasi ekonomi yang dinamis. Dalam aspek Keuangan diperlukan kestabilan likuiditas, dan pengendalian kredit macet untuk keberlangsungan LPD. Faktor manusia seperti kemampuan pengurus, pelatihan dan pendidikan juga penting dalam memastikan praktik operasional yang baik. Urgensi pelaporan finansial yang memenuhi aspek relevansi, presisi, serta aktualisasi menjadi krusial, mengingat dokumen tersebut berfungsi sebagai instrument fundamental dalam memelihara kepercayaan pemangku Kepentingan terhadap LPD.

Ekspansi positif LPD di Bali terjustifikasi melalui peningkatan kuantitas institusi secara konsisten yang tersebar di berbagai yurisdiksi wilayah perdesaan. Berdasarkan data pada Maret 2024, terdapat sebanyak 1.439 LPD di Bali dan 169 LPD di Kabupaten Buleleng ([balisatudata.baliprov.go.id](http://balisatudata.baliprov.go.id)). Secara spesifik di wilayah Kubutambahan, terdapat 22 unit LPD yang beroperasi guna memfasilitasi kebutuhan finansial komunitas pada masing-masing yurisdiksi desa adat. Institusi ini merepresentasikan Entitas intermediasi finansial yang berperan strategis dalam menstimulasi penyediaan modal kerja bagi masyarakat lokal. Data hasil observasi lapangan mengungkap adanya kecenderungan pengabaian akuntabilitas pelaporan fiskal pada sejumlah unit LPD, yang memicu deficit finansial signifikan hingga berujung pada insolvensi serta terminasi operasional lembaga. Distribusi kegagalan operasional institusi ini tersebar di Beberapa wilayah dengan rincian lima unit di Buleleng dan Seririt, empat Entitas di Sukasada dan Banjar, serta satu unit di

Busungbiu. Secara komparatif kecamatan Kubutambahan mencatat tingkat insolvensi tertinggi dengan akumulasi delapan LPD yang telah menghentikan aktivitas fungsionalnya.

Tabel 1. 1 Daftar Unit LPD di Wilayah Kubutambahan

No.	Desa	Keterangan
1	Desa Bayad	Aktif
2	Desa Bengkala	Tidak Aktif
3	Desa Bila Bajang	Tidak Aktif
4	Desa Bila Tua	Aktif
5	Desa Bontihing	Tidak Aktif
6	Desa Bukti	Aktif
7	Desa Bulian	Aktif
8	Desa Depeha	Aktif
9	Desa Kelampauk	Aktif
10	Desa Klandis	Tidak Aktif
11	Desa Kubu Tambahan	Aktif
12	Desa Mengandang	Tidak Aktif
13	Desa Pakisan	Tidak Aktif
14	Desa Rendetin	Tidak Aktif
15	Desa Sangburni	Aktif
16	Desa Sanis	Aktif
17	Desa Tajun	Aktif
18	Desa Tambakan	Aktif
19	Desa Tamblang	Aktif
20	Desa Tangkid	Aktif
21	Desa Tegal	Aktif
22	Desa Tunjung	Tidak Aktif

Banyak LPD di Kubutambahan yang masih belum memiliki pemahaman yang memadai Dengan standar Akuntansi. Menurut (Wati, 2024) sejumlah unit LPD di wilayah Kubutambahan, khususnya pada Entitas Bengkala, Bila Bajang, Bontihing, Klandis, Mengandang, Rendetin serta Tunjung terindikasi mengalami anomaly akuntansi, fenomena ketidakseimbangan neraca ini dipicu oleh rendahnya presisi manajerial serta malapraktik dalam pencatatan transaksi yang berimplikasi pada diskrepansi laporan keuangan. Kesalahan pencatatan dan mengesampingkan laporan Keuangan mencerminkan lemahnya penerapan dalam standar Akuntansi

dan kurangnya pelatihan bagi pengurus. Apabila situasi tersebut terus berlanjut maka LPD akan berisiko kehilangan kepercayaan masyarakat serta sulit berkembang dan berkontribusi dalam perekonomian desa secara baik.

Salah satu preseden penyimpangan Integritas ditemukan pada LPD Tamblang di wilayah Desa Adat Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, berdasarkan dokumentasi publik oleh detik.com, institusi tersebut terindikasi mengalami tindak pidana korupsi yang mencederai tata kelola keuangan lembaga. Terdakwa terindikasi melakukan praktik korupsi dalam rentang waktu berkelanjutan antara tahun 2014 hingga 2021, tindakan malapraktik finansial tersebut diestimasikan telah mengakibatkan deficit kerugian Negara maupun lembaga dengan nilai valuasi mencapai Rp1,5 miliar. Terdakwa diduga kuat melakukan rekayasa informatik terhadap data finansial serta penyalahgunaan wewenang melalui penarikan dana likuid dari kas LPD Desa Adat Tamblang secara non-prosedural. Kemudian Kasus ini dikembangkan sampai tahun 2025, dimana terdapat 2 pengurus lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka, sehingga kerugian Negara diperkirakan telah mencapai lebih dari Rp 2,5 miliar (Suadnyana, 2025). Dari otoritas LPLPD per 25 Mei 2025 menunjukkan penyusutan jumlah lembaga aktif, dimana delapan dari 22 LPD di wilayah tersebut telah berhenti beroperasi. Entitas yang dinyatakan nonaktif mencakup LPD Mengandang, Klandis, Bengkala, Bontihing, Tunjung, Bajang, Pakisan dan Rendetin. Kondisi degradasi operasional tersebut secara general dipicu oleh eskalasi rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan) serta deficit likuiditas, fenomena ini cenderung tidak tertangani secara komprehensif akibat inefektivitas fungsi pengawasan internal, khususnya dalam memitigasi risiko pada tahapan penyaluran pembiayaan

yang minim supervise serta evaluasi periodic oleh dewan pengawas. Temuan hasil wawancara dengan otoritas LPLPD mengonfirmasi adanya praktik asimetri informasi dalam pelaporan keuangan, di mana instrument kredit bermasalah secara sengaja diklasifikasikan sebagai aset lancar demi mempertahankan citra kesehatan institusi, praktik manipulative ini mengakibatkan laporan keuangan kehilangan aspek reliabilitasnya sehingga memicu distorsi signifikan dalam penyajian informasi finansial yang pada akhirnya mereduksi kualitas pelaporan secara keseluruhan. Ketiadaan rincian posisi keuangan dalam laporan yang disajikan berimplikasi pada munculnya kendala bagi pengurus untuk mengukur capaian Kinerja lembaga. Imbasnya, dokumen finansial tersebut kehilangan relevansinya sebagai basis pertimbangan pengambilan keputusan strategis. Fenomena yang ditemukan menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam pelaporan variabel dependen pada setiap periode akuntansi, yang dimana pada setiap pembukuannya masih ada perubahan format penulisan tanpa penjelasan yang jelas. Dalam laporan keuangan masih ditemukan penggunaan istilah nonbaku yang tidak sesuai dengan standar akuntansi, sehingga menimbulkan kebingungan bagi pihak yang membaca laporan. Akibatnya kualitas laporan keuangan menurun, sehingga dapat terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan, menimbulkan kerugian, dan menurunkan kepercayaan pihak terkait, yang pada akhirnya menyebabkan Beberapa LPD tidak dapat beroperasi. Dari perspektif pengembangan sumber daya manusia, efektivitas program pelatihan masih terhambat oleh rendahnya tingkat retensi dan implementasi materi dalam tugas operasional yang berimplikasi pada persistensi deviasi terhadap regulasi internal. Selain itu terdapat diskrepansi dalam metode distribusi pelatihan, prioritas partisipasi cenderung hanya diberikan kepada

personel baru, sementara pegawai yang telah mengikuti pelatihan namun belum mencapai penguasaan kompetensi penuh justru tereklusi dari program penguatan berkelanjutan. Pelatihan juga dilaksanakan satu kali dalam setahun sehingga kesempatan dalam memperdalam pengetahuan menjadi terbatas. Kapasitas intelektual kepengurusan juga menjadi kendala signifikan dengan prevalensi lulusan sarjana hanya mencapai estimasi 30%. Kesenjangan latar belakang pendidikan ini berimplikasi pada rendahnya aksentuasi terhadap standar akuntansi, yang pada gilirannya menyebabkan ketidakselarasan dalam strukturisasi serta penyajian laporan keuangan institusi. Fenomena ini merefleksikan bahwa fragilitas system pengawasan internal, disparitas kualifikasi akademik, serta inefektivitas program pengembangan kompetensi bagi aparatur pengelola telah menciptakan celah bagi munculnya malapraktik dalam tata kelola finansial LPD, akibatnya laporan keuangan yang dihasilkan gagal merepresentasikan posisi fiskal yang sesungguhnya dan kehilangan Integritas informasinya. Dalam menyusun catatan keuangan berkualitas, pelatihan bagi perangkat desa serta pengawasan internal haruslah baik.

Menurut (Damayanti & Julianto, 2024) entitas memerlukan ketersediaan laporan keuangan yang komprehensif serta presisi guna memitigasi risiko penilaian dan memastikan akurasi dalam proses rekognisi serta evaluasi Kinerja lembaga. Hal ini didasari oleh urgensi laporan keuangan sebagai instrument transparansi yang merefleksikan efektivitas serta akuntabilitas manajerial dalam mengorkestrasi sumber daya organisasi. Menurut (Sujana et al., 2020) ketidaksiapan maturitas sumber daya manusia berpotensi memicu disorientasi operasional, dimana ketidakmampuan personel dalam mengintegrasikan prosedur strategis berakibat

pada kegagalan sinkronisasi antara perencanaan dan implementasi di lapangan. Entitas mikro ini memiliki urgensi besar untuk merealisasikan variabel dependen. Hal ini dikarenakan konstruk endogen tersebut berfungsi sebagai pilar utama dalam perumusan kebijakan material, sekaligus menjadi manifestasi akuntabilitas publik atas seluruh dinamika operasional selama satu siklus akuntansi. Merujuk pada pandangan (Dewi et al., n.d.) tingkat keberhasilan variabel dependen dalam riset ini diukur berdasarkan kemampuan instrument tersebut dalam mendistribusikan data yang akurat, memiliki tingkat keandalan yang kuat, serta bebas dari indikasi distorsi informasi yang bersifat material. Menurut (Lisa et al., 2025) problematika yang melanda LPD secara inheren bersumber dari malapraktik manajerial yang dilakukan oleh para pengelola. Kegagalan dalam menjaga Integritas dan Profesionalisme ini berimplikasi langsung pada degradasi legitimasi serta merosotnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi keuangan adat tersebut. Menurut (Adinda et al., 2024) Integritas laporan keuangan mensyaratkan penerapan prinsip transparansi yang rigid sebagai manifestasi konkret dari pertanggungjawaban manajerial terhadap para pemangku kepentingan. Penyusunan laporan keuangan diorientasikan untuk mendiseminasi data finansial krusial yang dipersyaratkan dalam formulasi keputusan strategis baik pada dimensi Bisnis maupun pertimbangan ekonomi yang lebih luas. substansi informasi yang termuat dalam laporan keuangan merepresentasikan potret komprehensif mengenai posisi finansial serta kondisi kesehatan fiskal dari suatu Entitas secara holistik. Oleh karena itu, terdapat urgensi bagi pihak manajerial untuk menyusun pelaporan keuangan yang menjunjung tinggi prinsip konsistensi serta nilai objektivitas yang absolut guna memastikan bahwa setiap informasi yang disajikan selaras dengan

realistis transaksi yang terjadi. Mengacu pada regulasi dalam PP No. 71 Tahun 2010 serta selaras dengan prinsip SAP, kredibilitas variabel dependen ditentukan oleh pemenuhan prasyarat normative. Atribut utama yang wajib melekat pada konstruk kriteria ini meliputi keterandalan data, keberdayagunaan informasi bagi keputusan strategis, konsistensi penyajian antar periode, serta kemudahan untuk diinterpretasikan. Output Y yang memenuhi kriteria tersebut memberikan signifikan besar bagi publik dan aparat kewilayahan selaku penyedia modal sekaligus pengelola entitas. Menurut (Permatasari & Agustina, 2021) objektivitas penyajian laporan keuangan cenderung terkompromi oleh determinansi faktor internal khususnya mekanisme suksesi kepemimpinan melalui musyawarah adat yang memprioritaskan legitimasi social diatas kompetensi teknis, penunjukan ketua LPD yang kerap mengabaikan rekam jejak pengalaman serta kualifikasi pelatihan formal ini menciptakan risiko manajemen yang signifikan terhadap Integritas pelaporan keuangan lembaga. Konsekuensinya proses strukturisasi pelaporan keuangan kerap menghadapi hambatan sistematis yang signifikan sebagai implikasi logis dari keterbatasan literasi akuntansi serta deficit pemahaman teknis di kalangan pengelola LPD. Menurut (Pramitha et al., 2024) ketepatan data pada laporan Keuangan juga terganggu apabila kurangnya sertifikasi dari pihak karyawan yang dapat menyebabkan laporan menjadi tidak akurat dan tidak terpercaya. Menurut (Perdana et al., 2025) pelaporan keuangan diorientasikan untuk menyediakan data komprehensif mengenai posisi finansial, capaian Kinerja, serta fluktuasi arus kas Entitas, informasi tersebut berfungsi sebagai basis kritikal bagi para pemangku Kepentingan dalam memformulasi keputusan ekonomi yang strategis dan berbasis data. Menurut (Lestari, 2025) laporan keuangan dengan

kualitas inferior berpotensi mendegradasi legitimasi publik sementara penyajian laporan keuangan yang berkualitas tinggi merefleksikan tata kelola keuangan yang akuntabel serta selaras dengan pemenuhan ekspektasi dan Kepentingan masyarakat. Kualitas laporan Keuangan memiliki peranan yang penting terhadap keberlanjutan LPD. Keberhasilan dalam menyajikan variabel dependen yang memenuhi kualifikasi aktualitas manfaat, keaslian data, keterandalan, serta konsistensi komparatif, terbukti mampu mengeskalasi legitimasi publik. Disamping itu, terpenuhinya karakteristik konstruk Y tersebut mempermudah fungsi control pihak eksternal sekaligus menjadi instrument navigasi bagi manajemen dalam memformulasikan kebijakan strategis. Sebaliknya, rendahnya validitas dan akurasi informasi pada variabel dependen berisiko memicu celah terjadinya asimetri informasi serta tindakan fraud. Dampak berantai dari buruknya kualitas konstruk kriteria ini adalah runtuhnya legitimasi publik, yang pada akhirnya mengekspos instansi pada risiko penghentian operasional.

Integritas pelaporan keuangan mensyaratkan penyajian data yang selaras dengan realitas objektif sehingga dokumen tersebut dapat dijustifikasi sebagai fundamen dalam pengambilan keputusan strategis sekaligus instrument akuntabilitas publis kepada masyarakat desa adat. Menurut (Yusran, 2023) laporan Keuangan yang berkualitas tinggi, dapat memberikan dampak positif bagi pemakainya yaitu pemangku Kepentingan dalam organisasi. Menurut (Mutiar & Yudiantara, 2021) pelaporan keuangan merupakan representasi sistematis yang mentransformasikan data transaksi menjadi informasi finansial terstruktur yang berfungsi sebagai instrument analitis untuk memonitoring serta mengevaluasi dinamika operasional di dalam Entitas bisnis. Sejalan dengan pemikiran (Ristyani

et al., 2025) penyajian variabel dependen berperan sebagai instrument navigasi bagi organisasi untuk mendeteksi dinamika performa usaha serta fluktuasi modal secara transparan. Keandalan konstruk kriteria ini bertumpu pada indikator keragaman komparatif, kejelasan structural, ketepatan substansi, serta objektivitas data, yang secara kolektif berfungsi memelihara legitimasi publik sekaligus menjaga kelangsungan usaha entitas. Menurut (Pasek & Pasek, 2023) meskipun informasi dalam laporan keuangan memiliki relevansi yang tinggi, efektivitasnya akan teranulir apabila penyajiannya tidak memenuhi standar reliabilitas, ketidakmampuan dalam menyajikan data yang andal menyebabkan hilangnya kredibilitas informasi di mata pengguna sehingga aspek keterandalan memegang peranan krusial sebagai determinan utama dalam Integritas pelaporan. Guna mewujudkan standar kualitas tersebut diperlukan sinergi dari berbagai dimensi strategis yang mencakup efektivitas pengawasan internal, peningkatan kualifikasi akademik pengurus, serta intensitas pelatihan teknis. Integritas aspek tersebut menjadi determinan kunci untuk menjamin bahwa pelaporan keuangan diproses secara akurat serta disajikan secara tepat waktu. Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui teori signaling, dimana laporan keuangan dianggap menjadi sinyal yang dikirimkan oleh pengurus kepada pihak eksternal seperti lembaga pengawas, dan masyarakat. Implementasi prinsip reliabilitas, relevansi, komprehensibilitas, dan komparabilitas dalam penyusunan laporan keuangan berfungsi sebagai transmisi sinyal positif yang merepresentasikan stabilitas fundamental lembaga, manifestasi dari kualitas informasi tersebut secara simultan mampu mengeskalisasi derajat transparansi serta memperkokoh basis kepercayaan publik terhadap kredibilitas institusi. Tetapi sebaliknya, jika laporan keuangan yang

diterima pihak luar menjadi negative dan dapat menimbulkan turunnya kepercayaan dan kerugian bagi lembaga. Oleh karena itu, penguatan dimensi variabel-variabel eksogen memegang peranan krusial untuk menjamin bahwa indikator sinyal yang dipancarkan melalui variabel dependen mampu merepresentasikan kondisi fundamental Entitas secara factual dan objektif.

Pengawasan internal merupakan determinan krusial dalam preservasi kualitas laporan keuangan pada LPD, mekanisme ini diartikan sebagai serangkaian prosedur sistematis yang diimplementasikan oleh figure otoritas terkait guna memvalidasi bahwa seluruh system serta protocol operasional telah dieksekusi secara konsisten dan akurat sesuai dengan regulasi yang berlaku. Yang dimana berfungsi sebagai system control dan bentuk pengawasan langsung yang dilakukan secara rutin oleh pihak yang berwenang. Menurut (Olivia et al., 2024) pengawasan dapat dilakukan Dengan berbagai bentuk yaitu audit, review, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis. Merujuk pada temuan (Sanjaya et al., 2025) optimalisasi peran variabel independen sangat ditentukan oleh pemenuhan kapasitas intelektual laborat yang membidangi tata kelola dan pemeriksaan internal. Atribut kompetensi tersebut menjadi prasyarat mutlak dalam mengawal independensi dan standar kerja profesional saat mengukur tingkat kepatuhan sirkulasi lembaga. Pengawasan lebih menekankan pada proses pengecekan dan evaluasi pasca pelaksanaan, jadi lebih daripada system atau aturan yang dibangun untuk mencegah kekeliruan. Pengawasan bersifat korektif dan reaktif, yaitu bertugas untuk menemukan dan menindaklanjuti penyimpangan yang tidak sesuai teradap standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan teori yang dikemukakan (Jatmiko, 2020) peran variabel independen diposisikan sebagai instrument pengendalian awal untuk mereduksi

potensi pemborosan maupun deviasi operasional sejak dini. Keberadaan konstruk penentu ini sangat vital dalam menavigasi akselerasi instansi demi merealisasikan target jangka panjang secara optimal. Regulasi dalam PP Nomor 60 tahun 2008 memosisikan variabel predictor sebagai sebuah system terpadu yang memayungi aktivitas verifikasi finansial, uji kepatuhan, pemantauan sistemik, dan tindakan manajerial. Fungsi dari variabel bebas tersebut ditujukan untuk mengawal seluruh linieritas operasional dan pencapaian target kerja organisasi. Mekanisme ini di orientasikan untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan operasional selaras dengan parameter yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif guna mendukung akselerasi pimpinan dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang kredibel. Merujuk pada pemikiran (Lestari, 2025) kegagalan optimalisasi pada variabel dependen pada dasarnya dipicu oleh lemahnya tata kelola variabel independen. Rendahnya kualitas variabel bebas tersebut menjadi stimulant bagi munculnya deviasi regulasi serta fluktuasi akurasi dalam dokumentasi pos-pos transaksi. Implikasi sistemik dari rendahnya kualitas informasi keuangan tersebut pada akhirnya bermuara pada degradasi kepercayaan masyarakat terhadap Integritas pengelolaan lembaga. Oleh karena itu penguatan efektivitas pengawasan internal menjadi prasyarat fundamental dalam mengeskalasi kualitas laporan keuangan guna memastikan setiap informasi yang disajikan memenuhi standar Integritas dan akuntabilitas yang dipersyaratkan. Menurut penelitian (Iqbal et al., 2022) mengonfirmasi bahwa variabel eksogen memberikan kontribusi searah dan signifikan. Menurut penelitian (Indrawan & Dewi, 2022) bahwa variabel independen memberikan pengaruh secara signifikan terhadap eskalasi mutu variabel dependen. Menurut penelitian (Agustina & Wardany, 2022) variabilitas

pada variabel eksogen tidak memperlihatkan adanya kontribusi terhadap perubahan nilai variabel terikat.

Selain pengawasan internal, kualifikasi akademik atau tingkat pendidikan merupakan determinan fundamental yang secara signifikan memengaruhi kualitas laporan keuangan. Latar belakang pendidikan yang memadai menjadi prasyarat dalam membangun kompetensi kognitif pengurus sehingga mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip akuntansi yang kompleks secara akurat dan akuntabel. Eksistensi variabel dependen yang memenuhi standar mutu sangat ditentukan oleh keterlibatan elemen variabel eksogen yang dibekali dengan kapasitas intelektual serta pemahaman mendalam terhadap doktrin pelaporan finansial. Penguatan pada konstruk  $x$  ini menjadi fondasi utama dalam mengeliminasi bias penyajian data. Kompetensi teknis tersebut menjadi determinan utama yang secara langsung memengaruhi integritas dan validitas proses penyajian informasi keuangan dalam suatu entitas. Menurut (Raditya & Yasa, 2022) literasi akuntansi merupakan fondasi fundamental yang wajib dikuasai oleh praktisi keuangan mengingat terdapat korelasi linear antara kualifikasi akademik dengan efektivitas penyelesaian tugas. Eskalasi pada dimensi variabel eksogen yang diukur melalui latar belakang akademis yang selaras terbukti berkorelasi positif terhadap optimalisasi kapasitas variabel dependen. Penguatan konstruk  $X$  ini memberikan stimulasi yang signifikan dalam memacu efisiensi serta ketepatan penyelesaian target kerja fungsional di dalam organisasi. Menurut (Adnyana et al., 2025) pendidikan merupakan instrument strategis yang berfungsi sebagai wahana utama dalam mengakuisisi kerangka teoretis serta keterampilan teknis bagi individu. Dalam konteks profesional, jenjang pendidikan formal menjadi basis fundamental

yang membekali personel dengan kapabilitas yang diperlukan guna mengeksekusi tanggung jawab pekerjaan secara kompeten dan profesional. Pendidikan formal merupakan instrument krusial dalam memfasilitasi penyelesaian tugas serta problematika organisasional secara efektif. Secara spesifik pengurus dengan latar belakang pendidikan akuntansi memiliki kapasitas teknis untuk mengatensi berbagai kompleksitas dalam penyusunan laporan keuangan. kompetensi tersebut menjadi prasyarat dalam menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas dan kredibel guna menjaga kepercayaan serta akuntabilitas terhadap nasabah selaku pemilik dana. Sejalan dengan temuan empiris yang dikemukakan oleh (Mawarni & Nuraini, 2021), (JULIANTIKA, 2023) hasil estimasi model menunjukkan bahwa variabilitas pada dimensi variabel eksogen memberikan kontribusi yang bermakna secara statistic terhadap deviasi mutu variabel terikat. Menurut penelitian (Pebrianti Putri dan Vina Merliana, 2024) mengemukakan tingkat pendidikan memberikan pengaruh negative dan signifikan.

Disamping efektivitas pengawasan internal dan kualifikasi akademik atau tingkat pendidikan, pelatihan juga merupakan variabel determinan yang secara signifikan memengaruhi kualitas laporan keuangan. LPD pada umumnya dikelola oleh perangkat desa yang tidak selalu mempunyai latar belakang dari bidang Akuntansi atau Keuangan. pelatihan didefinisikan sebagai suatu mekanisme sistematis yang diorientasikan untuk mengeskalasi kompetensi intelektual, kapabilitas teknis serta internalisasi perilaku kerja personel. Transformasi ini bertujuan untuk menciptakan sinkronisasi antara kapasitas individu dengan saasaran strategis yang ingin dicapai oleh organisasi. Sehingga pelatihan yang kurang memadai dapat menimbulkan pengurus yang tidak memahami prinsip dari

penyusunan laporan Keuangan yang benar, dan dapat membuka celah untuk melakukan kesalahan pencatatan yang dapat menyebabkan perkembangan LPD terhambat dan penyimpangan. Hal ini hanya akan merugikan Keuangan lembaga, tetapi juga merusak kepercayaan sekitar terhadap LPD sebagai pilar ekonomi desa. Berdasarkan wawancara dengan pihak LPLPD, adapun Beberapa jenis pelatihan yang diberikan kepada LPD berupa pelatihan digitalisasi untuk mempermudah dalam akses keuangan masyarakat, lalu ada pelatihan manajemen risiko dan kepatuhan agar pengurus memiliki kemampuan mengelola risiko, mencegah fraud dan korupsi guna meminimalkan potensi kecurangan ataupun penyimpangan, pelatihan akuntansi dan pengawasan yang dimana berfokus pada pegawai LPD agar dapat membuat pembukuan yang baik, pengawasan Kinerja dan tata kelola bagi pengawas LPD yang ikut andil dalam meningkatkan kualitas dari laporan keuangan, selain itu ada pelatihan kaderisasi pengurus yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pengelola dalam mengelola kredit dan meningkatkan Kinerja keuangan LPD. Tingkat pendidikan dan pelatihan sama-sama memiliki peran dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, tetapi kedua hal tersebut juga memiliki perbedaan yang mendasar. Tingkat pendidikan menggambarkan latar belakang pendidikan formal yang ditempuh oleh individu yang membentuk kemampuan dan pemahaman mengenai prinsip akuntansi, sedangkan pelatihan lebih bersifat praktis dan diberikan dalam waktu yang singkat dan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis. Menurut (Bokol & Perdana, 2020) penyajian laporan keuangan yang kredibel mensyaratkan dukungan sumber daya manusia dengan literasi akuntansi minimal setara jenjang pendidikan menengah kejuruan. Namun guna menghasilkan output yang berkualitas tinggi,

kualifikasi dasar tersebut harus diperkuat dengan pemahaman akuntansi yang mendalam serta program pelatihan teknis yang komprehensif sebagai pilar utama dalam proses penyusunan informasi keuangan. Menurut (Agung & Mulyani, 2020), penguasaan standar akuntansi yang mumpuni mampu memitigasi ketimpangan informasi dalam pelaporan keuangan. dengan mengacu pada standar yang berlaku pengetahuan tersebut memastikan laporan yang dihasilkan lebih akurat, transparan, bebas dari distorsi. Terdapat inkonsistensi hasil penelitian terkait pengaruh pelatihan terhadap variabel dependen Y dimana (Ariska et al., 2023), menemukan adanya pengaruh searah yang nyata, sementara (Riyanita, 2020), justru menunjukkan bahwa pelatihan tidak memberikan kontribusi signifikan variabel terikat.

Riset ini adalah sebuah pengembangan dari (Dwipayana, 2022) yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Kualitas Pelatihan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Lpd Se-Kabupaten Jembrana”. Keunikan kontribusi ilmiah dalam kajian ini terletak pada rekonstruksi model konseptual yang mengintegrasikan dimensi tata kelola internal serta stratifikasi akademis sebagai variabel eksogen. Kebaruan structural tersebut dikombinasikan bersama predictor terdahulu untuk menguji daya intervensinya terhadap variabilitas mutu konstruk dependen pada lembaga keuangan mikro. Pemilihan variabel-variabel dalam penelitian ini didorong oleh adanya fenomena permasalahan pada LPD se-Kecamatan Kubutambahan serta adanya inkonsistensi pada hasil penelitian terdahulu. Hal tersebut menjadi urgensi bagi peneliti untuk melakukan pengujian kembali guna memperoleh konfirmasi yang lebih akurat. Karakteristik distingtif penelitian ini juga terletak pada lokus penelitiannya yakni

berfokus pada unit perkreditan desa wilayah kecamatan kubutambahan. Pemilihan lokasi ini bertujuan untuk menangkap fenomena spesifik yang terjadi pada Entitas keuangan adat di wilayah tersebut. Orientasi utama dari kajian ini adalah untuk mengevaluasi serta mengonfirmasi data penetrasi variabel eksogen terhadap variabilitas mutu variabel dependen. Melalui pengujian model ini, diharapkan mampu menyumbangkan bukti empiris baru yang dapat memediasi inkonsistensi temuan dalam literature terdahulu yang menguji determinan variabel Y secara parsial. Adanya kontradiksi empiris ini memberikan ruang bagi peneliti untuk melakukan pengujian ulang guna memverifikasi hubungan antar variabel tersebut. Dimana masih ditemukannya riset yang hasilnya berbeda atau tidak signifikan. Inkonsistensi temuan tersebut mengindikasikan adanya celah penelitian yang mendesak untuk dikaji lebih mendalam guna memberikan kepastian empiris.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengawasan Internal, Tingkat Pendidikan dan Pelatihan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada LPD Se-Kecamatan Kubutambahan”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

1. Lemahnya pengawasan internal yang dilakukan secara rutin oleh pihak berwenang yang menyebabkan penyimpangan yang tidak segera terdeteksi, sehingga berdampak pada variabel dependen.
2. Rendahnya variabel independen (X<sub>2</sub>) sebagian pengelola LPD, khususnya pada bidang Keuangan dan akuntansi, yang menyebabkan keterbatasan memahami prinsip dasar dalam mengelola Keuangan serta menyusun atau membuat laporan Keuangan yang berkualitas.

3. Kurangnya pelatihan bagi pengelola LPD, yaitu dalam bidang Akuntansi dan Keuangan, sehingga mengakibatkan rendahnya pemahaman terhadap penyusunan laporan Keuangan yang sesuai standar.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah bertujuan untuk memfokuskan ruang lingkup kajian guna menghindari pembahasan yang terlalu luas sehingga kesimpulan yang dihasilkan tetap akurat, relevan dan tidak menimbulkan ambiguitas. Adanya pembatasan ini bertujuan agar penelitian menjadi lebih focus dan terarah sehingga pencapaian tujuan penelitian dapat dilakukan secara lebih efektif dan tepat sasaran. Demi menjaga rigiditas dan focus analisis, batasan konstektual riset ini diprioritaskan pada pengujian efek kausalitas dari variabel eksogen terhadap konstruk dependen. Adapun unit analisis dan batasan spasial dalam observasi ini dispesifikasikan secara eksklusif pada unit yang beroperasi di wilayah kubutambahan.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan isi dari latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah Pengawasan internal berpengaruh terhadap kualitas laporan Keuangan pada LPD se-kecamatan Kubutambahan?
2. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kualitas laporan Keuangan pada LPD se-kecamatan Kubutambahan?
3. Apakah pelatihan berpengaruh terhadap kualitas laporan Keuangan pada LPD se-kecamatan Kubutambahan?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis apakah Pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan Keuangan pada LPD se-kecamatan Kubutambahan.
2. Untuk menganalisis apakah tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan Keuangan pada LPD se-kecamatan Kubutambahan.
3. Untuk menganalisis apakah pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan Keuangan pada LPD se-kecamatan Kubutambahan.

### **1.6 Manfaat Hasil Penelitian**

Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini :

#### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan akademis bagi mahasiswa dan praktisi akuntansi. Selain itu hasil studi ini diproyeksikan menjadi referensi serta penguat bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa.

#### **2. Manfaat praktis**

##### **a. Bagi Penulis**

Penelitian ini memberikan kontribusi pengetahuan serta pengalaman empiris terkait pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

##### **b. Bagi LPD**

Secara praktis, studi ini diproyeksikan sebagai instrument rujukan strategis bagi jajaran manajemen tata pamong lembaga dalam mengeskalasi mutu konstruk dependen. Penguatan pada sector pelaporan fiscal tersebut esensial

untuk mengukuhkan asas keterbukaan serta pemenuhan kewajiban pertanggung jawaban moral kepada konstituen publik.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Secara akademis, hasil investigasi ini diproyeksikan sebagai rujukan teoretis serta data sekunder pendukung bagi studi di masa depan yang bermaksud mereplikasikan atau memperluas pengujian dampak variabel eksogen terhadap variabel terikat. Keberadaan riset ini mempermudah pemetaan literature sejenis pada klaster lembaga keuangan mikro adat di tingkat regional.

d. Bagi Masyarakat/Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu mengedukasi masyarakat luas mengenai pentingnya pengawasan internal, tingkat pendidikan dan pelatihan dalam mewujudkan laporan keuangan LPD yang berkualitas.

